

**PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN
NAGARI DI KENAGARIAN IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG
KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh

**AFRITA
97263/2009**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

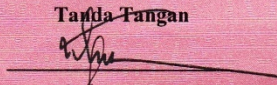
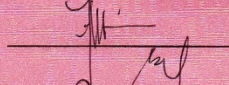



Pada hari Selasa 22 April 2014 Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

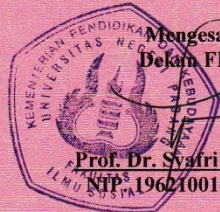
**Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Di Lembaga Pemerintahan Nagari Di
Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Afrita
TM/NIM : 2009/ 97263
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr.H. Helmi Hasan, M.Pd.	
Sekretaris	: Dr. Fatmariza, M.Hum.	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si.Ph.D.	
Anggota	: Dr. Hasrul, M.Si.	



**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**

Prof. Dr. Syairi Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Afrita: 2009/97263. Penerapan Nilai-nilai Demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam lembaga pemerintahan Nagari. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum optimalnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pergantian pimpinan, mewujudkan keadilan, melakukan kerja sama, dan menciptakan pemerintahan yang transparan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumenter. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie dapat dilihat *pertama*, menyelenggarakan pergantian pimpinan. pemerintahan Nagari IV Koto Hilie telah menyelenggarakan pergantian pimpinan Pemerintahan semenjak kembali pada sistem pemerintahan Nagari. Namun proses pemilihan calon wali Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie belum berjalan secara optimal. Akibatnya pada tahun 2007 sampai tahun 2009 pemerintahan Nagari dipimpin oleh sekretaris Nagari. *Kedua*, musyawarah. Dalam melakukan suatu kegiatan, Pemerintah Nagari IV Koto Hilie telah melaksanakan musyawarah dengan melibatkan anggota masyarakat. Musyawarah dalam hal ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari IV Koto Hilie. *Ketiga*, keadilan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis melihat bahwa belum terwujudnya keadilan dari segi ekonomi dalam masyarakat Nagari IV Koto Hilie. Hal ini disebabkan masih adanya unsur *nepotisme* oleh aparatur pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari. *Keempat*, kerja sama. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam merancang dan menetapkan peraturan Nagari. kerja sama antar lembaga Nagari dalam membahas rancangan peraturan Nagari belum optimal karena tidak adanya peraturan Nagari yang dihasilkan. *Kelima*, Keterbukaan. belum sepenuhnya pemerintah Nagari terbuka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi masih kurang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan dorongan dan do’a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosoal Universitas Negeri Padang.

4. Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Fatmariza, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hasrul, M.Si, Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D, dan Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Junaidi Indrawadi, S. Pd, M. Pd selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Aparatur pemerintahan Nagari beserta masyarakat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan demi kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang demokratis di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. KAJIAN TEORITIS ⁹	
1. Konsep dan Prinsip Demokrasi	9
a. Pengertian Demokrasi	10
b. Unsur-unsur Demokrasi	14
c. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup	15
d. Parameter Demokrasi	16
e. Nilai (kultur) Demokrasi	17
f. Lembaga (struktur) Demokrasi	24
2. Pemerintahan Nagari	25
a. Pengertian Pemerintahan	25
b. Pengertian Nagari	27

c. Pemerintahan Nagari.....	27
d. Lembaga-lembaga Pemerintahan Nagari.....	29
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Jenis Data Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Keabsahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus	
1. Penerapan Nilai-nilai demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian V Koto Hilie.....	57
a. Menyelenggarakan Pergantian Pimpinan Secara Teratur dan Damai.....	58
b. Musyawarah.....	67
c. Keadilan.....	73
d. Kerja Sama.....	79
e. Keterbukaan.....	83
C. Pembahasan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TAR TABEL

Tabel 3. 1. informan Penelitian	38
Tabel 4. 1. Jumlah penduduk Nagari IV Koto Hilie	49
Tabel 4. 2. Mata pencarian masyarakat Nagari IV Koto Hilie.....	49
Tabel 4. 3. Jumlah sarana agama di Nagari IV Koto Hilie	51
Tabel 4. 4. Klasifikasi Pentahapan Keluarga Sejahterah di Nagari IV Koto Hilie	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	36
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari	53
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi BAMUS	55
Gambar 4. 3. Peta lokasi Kenagarian IV Koto Hilie.....	56
Gambar 4. 4. Musyawarah yang dilaksanakan diikuti oleh ketua BAMUS, kepala kampung, pengurus LPMN Nagari, KPMN Nagari, perwakilan kelompok perempuan serta tokoh masyarakat Nagari	68
Gambar 4.5. Perwakilan kampung Limau Sundai menyampaikan aspirasi dari masyarakat Limau Sundai	69
Gambar 4.6. Perwakilan Kampung Teluk Betung menyampaikan aspirasi dari masyarakat Teluk Betung	71
Gambar 4.7. perwakilan setiap kampung menyampaikan aspirasi masyarakatnya kepada pemerintah Nagari yang ditulis dalam kertas	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Izin Penelitian dari Fakultas
2. Izin Penelitian dari Kantor Kesbangpol dan Linmas
3. Izin Penelitian dari Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan perizinan Terpadu
4. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Wali Nagari IV Koto Hilie
5. Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah resmi dilaksanakan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari, maka secara bertahap dan pasti seluruh bentuk sistem pemerintahan Desa yang diterapkan selama masa Orde Baru telah berubah menjadi pemerintahan Nagari. Penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari tersebut telah memberikan keleluasaan untuk menerapkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dalam rangka membangun kemandirian untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, Nagari merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggotanya, punya pemerintahan sendiri, adat sendiri, yang mengatur tatanan kehidupan anggotanya. Kejatuhan Orde Baru telah mengantarkan sebuah republik kecil (*nagari*) memasuki masa transisi menuju sebuah konsep demokrasi.

Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Sumatera Barat, tidak saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga sebagai basis pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan nagari lebih berorientasi pada kebutuhan, tuntutan, dan keinginan anak nagari yang ditetapkan melalui musyawarah. Pemerintah

Nagari harus mampu membangun nagarinya sendiri dengan meningkatkan kebersamaan dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Semangat kembali bernagari akan membawa masyarakat Sumatera Barat pada suasana kehidupan yang penuh dengan harapan-harapan, dan tumpuan dari harapan-harapan itu pada tingkat pertama tertuju pada lembaga pemerintahan nagari.

Demi terwujudnya harapan-harapan itu maka hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan cara melembagakan sistem kepemimpinan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai *entry point* kepemimpinan demokratis adalah dilaksanakannya mekanisme pemilihan pemimpin secara jujur, terbuka dan memberikan kesempatan bagi semua pihak dalam pencalonan, mengefektifkan hak-hak masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta mengevaluasi jalannya pemerintahan dan program-program pembangunan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, membangun kesepahaman antara lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dengan lembaga pemerintahan nagari, membuat mekanisme kerja dalam bidang sosial budaya terutama melestarikan adat-istiadat pada semua lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu yang harus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah Sumber daya aparatur pemerintah nagari. Sebab

dengan birokrasi yang baik maka akan dapat memberikan sumbangan pemikiran demi terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Agar demokratisasi itu dapat berlangsung, diperlukan iklim keterbukaan dalam masyarakat. Terciptanya pemerintahan yang transparan maka masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Serta meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan nagari, dan adanya kontrol masyarakat.

Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pelaksanaan pemerintahan nagari berdasarkan nilai-nilai demokrasi di Kenagarian IV Koto Hilie belum sepenuhnya terwujud serta belum mampu menumbuhkan inovasi pembangunan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penulis menemui masih adanya unsur *nepotisme* oleh aparat pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ina dalam wawancara tanggal 7 November 2013, yang mengatakan bahwa :

“dikampung awak kok ado bantuan nan datang, urang tu sistim famili sajo, contoh sajo pambagian bareh, untuak mambagian kupon bareh tu nyo bagikan malam hari, kok tahu beko etek minta pulo.(dikampung kita jika ada bantuan yang datang, orang sisteim famili saja, contohnya pembagian beras, untuk membagikan kupon beras tersebut dibagikan malam hari, biar kita tidak tahu, jika kalau nanti ibu minta pula)”

Masalah lain juga penulis temui terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan jika ditinjau dari segi keterbukaan pemerintah nagari dalam

memberi akses informasi kepada masyarakat. Penulis menemui bahwa tidak adanya pengumuman yang berisikan informasi seputar penyelenggaraan pemerintahan nagari di lembaga pemerintahan nagari Kenagarian IV Koto Hilie. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan dan program pemerintah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh sekretaris Nagari Bapak Delnafri dalam wawancara tanggal 21 Oktoberber 2013, yang mengatakan bahwa :

“ jika setiap informasi yang berhubungan dengan program kerja pemerintah diumumkan kepada masyarakat Nagari, maka hal itu akan menjadi hutang/beban bagi wali Nagari seandainya program pemerintah tersebut tidak berhasil dilaksanakan”

Dan jika dilihat keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap suatu keputusan yang dibuat, umumnya masyarakat masih enggan dan hanya menerima serta menjalankan keputusan saja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afrizal, salah satu anggota masyarakat yang berada di Kenagarian IV Koto Hilie pada tanggal 18 November mengungkapkan bahwa dia kurang mengetahui bagaimana bentuk program pemerintah dan seperti apa kebijakan-kebijakan yang ada dalam nagari. Dan jika pun ada keputusan atau peraturan yang dibuat oleh wali nagari dia akan mengikuti apabila keputusan tersebut tidak merugikan. Ia juga mengungkapkan bahwa urusan untuk melakukan pengawasan terhadap kerja wali nagari ada pihak lain yang melakukan tugas tersebut.

Hal lain yang juga terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu kurang terealisasinya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah nagari belum sesuai dengan prinsip keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jasmiati, salah satu anggota masyarakat di Kenagarian IV Koto Hilie pada September lalu mengungkapkan bahwa program-program pemerintah hanya diberikan kepada orang-orang terdekat yang membagikan bantuan tersebut, dan jika pun ada masyarakat yang kurang mampu memperoleh bantuan tersebut hanya sebagian kecil yang dapat.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Nilai Demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di kenagarian VI Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”

B. Identifikasi Masalah

Perlunya mengkaji penerapan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah permasalahan terkait dengan kenyataan berdemokrasi di Indonesia, maka dari itu perlu penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka terdapat beberapa masalah yang dianggap esensial yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk diteliti, yaitu *nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak tumbuh sesuai yang diharapkan, karena:*

1. Adanya unsur *nepotisme* oleh aparaturn pemerintah Nagari
2. Kurang terbukanya pemerintah nagari dalam memberi akses informasi kepada masyarakat.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
4. Program-program pemberdayaan masyarakat kurang terealisasi dengan baik.
5. Sistem kerja yang belum tertata dengan baik antar lembaga

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis membuat pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang dicapai. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai “Penerapan Nilai-nilai Demokrasi di lembaga pemerintahan nagari di kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Penulis secara garis besar ingin melihat bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi di kelembagaan pemerintahan nagari jika dilihat dari cara menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, musyawarah, keadilan, kerja sama, dan keterbukaan. Penerapan nilai demokrasi di lembaga pemerintahan nagari di batasi pada pemerintah nagari (wali nagari beserta perangkat), dan BAMUS Nagari, Sedangkan untuk waktu penelitian dibatasi pada tahun 2013-2014.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan pergantian pimpinan secara teratur dan damai di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie?
2. Bagaimana penerapan nilai musyawarah di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie ?
3. Bagaimana penerapan nilai keadilan di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie ?
4. Bagaimana penerapan nilai kerja sama di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie ?
5. Bagaimana penerapan nilai keterbukaan di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Penerapan pergantian pimpinan secara teratur dan damai di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie.

2. Penerapan nilai musyawarah di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie.
3. Penerapan nilai keadilan di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie.
4. Penerapan nilai kerja sama di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie.
5. Penerapan nilai keterbukaan di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian VI Koto Hilie.

F. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tentang praktek demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang diterapkan di wilayah Sumatra Barat, khususnya pada Nagari VI Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat menjadi bahan masukan maupun rujukan bagi penelitian lainnya.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Nagari VI Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa di Lembaga Pemerintahan Nagari sudah mulai diterapkannya nilai-nilai demokrasi tetapi pelaksanaannya belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Nagari. Nilai-nilai demokrasi tersebut yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur dan damai, musyawarah, keadilan, kerja sama, dan keterbukaan.

Pertama, dalam menyelenggarakan pergantian pimpinan di Nagari IV Koto Hilie telah mencerminkan adanya penerapan nilai demokrasi. Terlihat semenjak kembali pada sistem pemerintahan Nagari, di Nagari IV Koto Hilie telah melaksanakan pemilihan wali Nagari dua kali, sedangkan untuk pemilihan Badan Musyawarah Nagari baru dilaksanakan satu kali. Namun di Nagari IV Koto Hilie penerapan nilai-nilai demokrasi belum menghasilkan hasil yang optimal dikarenakan pada tahun 2007-2009 pemerintah Nagari IV Koto Hilie dipimpin oleh pejabat Wali Nagari. Hal ini disebabkan tidak tercapai suatu keputusan oleh unsur-unsur yang ada di Nagari dalam penentuan calon wali nagari untuk periode selanjutnya karena terjadi perebutan jumlah kursi diantara sesama unsur.

Kedua, nilai demokrasi yang dilihat yaitu musyawarah. Di Nagari IV Koto Hilie dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari, pemerintah nagari

terlebih dahulu melakukan musyawarah ketika akan melaksanakan suatu rencana atau kegiatan dengan mengikutsertakan perwakilan dari setiap kampung. Tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah menampung aspirasi dari masyarakat nagari untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di Nagari IV Koto Hilie, perwakilan dari setiap kampung telah ikut berpartisipasi dalam musyawarah yang dilaksanakan dengan menyampaikan setiap aspirasinya dan mengikuti jalannya musyawarah dengan baik.

Ketiga, dalam lembaga Pemerintahan Nagari nilai yang selanjutnya yaitu keadilan. Terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari IV Koto Hilie belum sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang demokrasi yaitu terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia. Terlihat masih adanya unsur kekeluargaan oleh aparat pemerintah Nagari yang menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Keempat, di lembaga pemerintahan Nagari IV Koto Hilie masih kurangnya penerapan nilai demokrasi. Terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal kerja sama antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam merancang dan menetapkan peraturan Nagari. Namun sayangnya, di Nagari IV Koto Hilie hubungan kerja sama ini belum menghasilkan hasil yang optimal dikarenakan terkendala oleh waktu karena aparat pemerintahan nagari memiliki tugas lain sehingga tidak ada peraturan Nagari yang dihasilkan dan pemerintah Nagari IV Koto Hilie hingga saat ini masih memakai peraturang yang lama.

Kelima, nilai demokrasi yang selanjutnya adalah keterbukaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Nagari, di Nagari IV Koto Hilie belum mencerminkan terwujudnya nilai demokrasi. Terlihat kurangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan Nagari. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh informasi karena ketidakterbukaan pemerintah dalam memberi akses informasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya adalah agar semua aparat pemerintah Nagari menyadari arti penting dari nilai-nilai demokrasi, apalagi jika dikaitkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, penerapan nilai-nilai demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari sangat penting karena menyangkut hidup masyarakat banyak.

Selain pihak pemerintah Nagari, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945, serta terwujudnya suasana kehidupan yang lebih demokratis dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin. 1995. *Tantangan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al Subandi, Marsudi. 2012. *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efriza. 2009. *Ilmu Politik: dari ilmu politik sampai sistem pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Frans, Magnis-Suseno SJ. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. Mas'oe Abidin. 2004. *Adat dan Syarak di Minangkabau*. Sumatra Barat: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatra Barat.
- Heri Hendriawanto, dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.
- Inu Kencana, Syafiie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1979. *Pengertian Pancasila Atas Dasar UUD 1945 & Ketetapan-Ketetapan MPR*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Amir Sutan. 1997. *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mochtar, Lubis, 1994. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.